

**NETWORK GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN  
BENCANA TANAH LONGSOR PADA MASA TANGGAP DARURAT  
DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muh Basith At Thariq  
Npp 31.0831

*Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*  
Email : [muhbasith.atthariq@gmail.com](mailto:muhbasith.atthariq@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

**ABSTRACT**

**Problem/Background:** *The Gowa Regency area is mostly hilly plateau, which is around 72.26% and has several areas that have the potential for dangerous landslides. The landslide disaster that occurred claimed many lives and had a devastating impact on the life cycle activities of the people of Gowa district who were affected by the landslide disaster. Objective:* This research aims to describe how Network Governance or network governance works in dealing with landslides in Gowa Regency, analyzing the supporting and inhibiting factors as well as the efforts made in dealing with landslides during the emergency response period in Gowa Regency. **Method:** This research uses the Network Governance theory by Provan and Kenis (2008) which has 4 dimensional stages, namely trust, number of network participants, network goal consensus, and need for network-level competencies (the need for network level competencies). **Results/findings:** The research results show that Gowa Regency government network governance in dealing with landslides during the emergency response period was optimal as seen from the fulfillment of the dimensions used. **Conclusion:** The most influential thing in disaster management, namely the budget, has been used optimally according to needs in managing landslides during the emergency response period, thus increasing the effectiveness of the disaster management carried out. **Keywords:** Network, Landslides, Emergency Response

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang:** Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% dan memiliki beberapa daerah yang berpotensi longsor berbahaya. Bencana longsor yang terjadi menelan banyak korban jiwa dan memberi dampak kerusakan pada kegiatan siklus kehidupan masyarakat kabupaten Gowa yang terkena bencana longsor. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana *Network Governance* atau tata jaringan kelola pemerintah (*Network Governance*) dalam penanggulangan bencana

tanah longsor di Kabupaten Gowa, menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa. **Metode** : Penelitian ini menggunakan teori *Network Governance* oleh Provan dan Kenis (2008) yang memiliki 4 tahap dimensi yaitu *trust* (kepercayaan), *number of network participants* (jumlah peserta jaringan), *network goal consensus* (tujuan konsensus jaringan), dan *need for network-level competencies* (kebutuhan akan kompetensi tingkat jaringan). **Hasil/temuan** : Hasil penelitian menunjukkan tata Kelola jaringan pemerintah Kabupaten Gowa dalam menanggulangi bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat sudah optimal terlihat dari terpenuhinya dimensi yang digunakan. **Kesimpulan** : Adapun hal yang paling berpengaruh dalam penanggulangan bencana tersebut yaitu anggaran, telah digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat sehingga meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana yang dilakukan.

**Kata Kunci** : Jaringan, Tanah Longsor, Tanggap Darurat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia kita ketahui sebagai negara yang besar dan kaya akan sumber daya yang sangat melimpah. Akan tetapi, segala kekayaan dan berbagai macam sumber daya alam yang kita miliki layaknya gunung, bukit, pantai, danau, dan laut seakan berbanding lurus dengan kenyataan berbagai ancaman bencana. Negara kita sendiri tergolong dalam negara yang rawan terjadi bencana. Hal ini berkaitan dengan situasi dan keadaan iklim, tanah, hidrologi, geologi, dan juga geomorfologi Indonesia.

Bencana yang terjadi beberapa mampu kita prediksi. Namun, banyak juga bencana yang datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Bencana yang seperti ini sering kali menimbulkan korban, kerusakan, dan kehilangan harta benda. Dalam kenyataannya, dunia yang kita pijaki ini tak akan lepas dari peristiwa bencana. Bencana telah menjadi gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian dan dirasakan masyarakat yang berdomisili di daerah yang rawan bencana. Bencana alam selalu menimbulkan keresahan pada masyarakat baik pada saat pra bencana, masa tanggap darurat bencana, maupun pada masa pasca bencana karena dapat mengganggu keberlanjutan kehidupan pada kawasan itu. Salah satu peristiwa alam yang terjadi dan bencana alam yang banyak menimbulkan kerugian adalah tanah longsor. Tanah longsor yang terjadi secara langsung dapat mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati dan rusaknya lahan. Rusak dan hilangnya keanekaragaman hayati akan mempengaruhi siklus hidrologi secara lokal maupun secara global.

Dalam mengatasi dan memetakan bencana di Indonesia, terdapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki peran sentral dan bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem pemetaan bencana yang komprehensif. BNPB memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait, memfasilitasi perencanaan mitigasi bencana yang

efektif, serta memberikan respons cepat dalam situasi darurat bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, puting beliung, letusan gunung berapi dan utamanya tanah longsor (BNPB, 2022).

Di Indonesia sendiri, bencana alam sangat sering terjadi dan mengancam nyawa serta mengganggu jalannya kehidupan masyarakat, salah satunya ialah bencana tanah longsor. Tanah longsor dapat dikatakan sebagai masalah serius bagi daerah yang memiliki banyak dataran tinggi baik gunung ataupun bukit. Bencana ini merupakan salah satu dari beberapa jenis bencana alam yang sering timbul di Indonesia selain banjir, gempa bumi, angin topan, kekeringan, dan lain-lain. Melalui data yang dipublikasikan di website Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, total bencana tanah longsor yang terjadi tiap tahunnya terus meningkat. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, akan tetapi bencana tanah longsor jika ditotalkan dalam lima tahun terakhir yakni dari tahun 2018 hingga 2022 memiliki jumlah yang mencapai angka 4.459 jumlah bencana yang bisa dikatakan sangat tinggi dan menyebabkan banyak korban jiwa.

Tanah longsor di Kabupaten Gowa merupakan ancaman serius yang membutuhkan penanganan cepat dan efektif. Penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Jaringan kerjasama yang dilakukan berbagai pihak memiliki keuntungan seperti peningkatan kolektif untuk menangani bencana, berbagi sumber daya dan informasi, serta peningkatan legitimasi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penerapan *network governance* sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Wilayah Kabupaten Gowa termasuk ke dalam wilayah yang mempunyai beberapa daerah berpotensi longsor tinggi dan cukup berbahaya. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Gowa memiliki sifat geologi yang kompleks, kemiringan lereng bervariasi, serta curah hujan yang juga bervariasi dari rendah hingga sangat tinggi.

**Tabel 1.1**  
**Luas Daerah Rawan Longsor (Ha) Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Luas Bahaya (Ha)			Total	Kategori
		Kelas				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Luwu Utara	14.002	280.978	94.766	489.746	Tinggi
2	Luwu Timur	166.009	150.577	44.956	361.542	Tinggi
3	Luwu	38.637	108.569	62.449	209.655	Tinggi
4	Tana Toraja	9.478	100.068	67.149	176.695	Tinggi
5	Enrekang	22.725	69.003	50.769	142.497	Tinggi
6	Bone	60.053	50.715	17.100	127.686	Tinggi
7	Gowa	37.996	42.044	16.623	96.663	Tinggi
8	Toraja Utara	5.340	70.278	14.994	90.612	Tinggi

9	Barru	26.704	31.689	16.174	74.567	Tinggi
10	Pinrang	16.952	29.807	31.609	78.368	Tinggi
11	Maros	36.284	20.101	9.885	66.270	Tinggi
12	Sidenreng Rappang	21.528	30.003	13.239	64.770	Sedang
13	Soppeng	2.313	35.186	11.726	49.225	Sedang
14	Sinjai	14.956	15.750	5.689	36.395	Tinggi
15	Kepulauan Selayar	20.184	9.682	1.414	31.280	Sedang
16	Pangkajene Kepulauan	12.836	10.515	5.465	28.816	Tinggi
17	Palopo	1.201	9.633	6.052	16.886	Tinggi
18	Jeneponto	6.662	4.832	2.605	14.099	Tinggi
19	Bantaeng	5.312	5.259	2.546	13.117	Tinggi
20	Wajo	10.846	1.541	170	12.557	Rendah
21	Bulukumba	3.041	3.820	2.370	9.231	Tinggi
22	Takalar	3.882	2.675	35	6.592	Sedang
23	Pare Pare	215	2.752	520	3.487	Sedang
24	Makassar	-	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Selatan		537.156	1.185.477	478.305	2.200.938	Tinggi

Sumber: Hasil KRB Sulawesi Selatan Tahun 2022

Dari hasil pengujian potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa menempati urutan ke-tujuh dengan Luas yang termasuk dalam kategori bahaya rendah berjumlah 37.996 ha, kategori sedang berjumlah 42.044 ha, dan kategori tinggi berjumlah 16.623 ha. Pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2022, terdapat 8 kejadian tanah longsor dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Adapun rekapitulasi data kerusakan dan korban jiwa akibat dari bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa Tahun 2019 – Tahun 2022 yaitu 56 orang meninggal, 21 orang hilang, dan 639 orang luka berat dan ringan.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara jaringan tata Kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa bersama para *stakeholder* yang terkait dalam upaya penanggulangan bencana longsor yakni pada tahap tanggap darurat di Kabupaten Gowa. Mengingat seringnya terjadi bencana longsor di Kabupaten Gowa beberapa tahun terakhir dan hampir setiap bencana menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan bangunan. Hal ini menjadi alasan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan konsep *Network Governance* atau tata Kelola adaptif pemerintah guna mengetahui bagaimana pemerintah Kabupaten Gowa melalui BPBD yang berkolaborasi dengan pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana longsor pada tahap tanggap darurat di Kabupaten Gowa.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan mengenai *network governance* dan bencana tanah longsor. Penelitian oleh Yana Syafieyana Hijri, Muhammad Kamil, Bayu Sadewo, Iradhad Taqwa Sihidi berjudul *Network Governance Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Di Kota Malang* membahas mengenai bagaimana implementasi tata kelola jaringan antar instansi sudah dijalankan dengan baik melalui program utama yakni kegiatan operasi pasar yang dimaksudkan untuk memberikan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang standar. Namun ada beberapa kendala dalam menjalankan tata kelola jaringan tersebut antara lain kualitas beras yang didistribusikan serta Kota Malang yang tidak memiliki Cadangan Beras Pemerintah Kota (Yana Syafieyana Hijri, Muhammad Kamil, Bayu Sadewo, Iradhad Taqwa Sihidi, 2021). Kemudian penelitian oleh Fajar Muhammad Rizky Ginting yang mengambil judul *Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru* membahas tentang semakin meningkatnya kedatangan dan keberadaan pencari suaka di wilayah Kota Pekanbaru telah menghadirkan permasalahan tersendiri yang ditakuti akan menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru (Fajar Muhammad Rizky Ginting, 2021). Lalu penelitian yang di publikasikan oleh Abdul Haris Helut berjudul *Kinerja Aparatur Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku*, meneliti tentang kinerja aparatur dalam penanggulangan bencana alam di BPBD Kota Ambon dalam melaksanakan tugas dan mengimplementasikan tujuan dari organisasi. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa kinerja aparatur dalam penanggulangan bencana tanah longsor di BPBD Kota Ambon Provinsi Maluku sudah berjalan dengan sangat baik. Namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya sumber daya aparatur serta kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Ambon (Abdul Haris Helut, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Berliani yang mengambil judul *Efektivitas Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali* yang membahas tentang efektivitas penanggulangan bencana tanah longsor serta apa saja faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan, dan kurangnya sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gianyar (Ayu Berliani (2023). Penelitian yang dilakukan oleh ST. Indah Trisnawanti (2022) yang berjudul “Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat”. Dalam penelitian ini membahas terkait

bencana tanah longsor sering terjadi dan selalu menjadi dampak kerugian tertinggi dibanding dengan dampak bencana alam lain di Kota Sukabumi. Dan mengemukakan hasil bahwa efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah digolongkan belum efektif, karena dilihat dari tiga ukuran efektivitas dimana hanya satu indikator yang dapat dikatakan tercapai yaitu integrasi, sedangkan pencapaian tujuan dan adaptasi masih belum maksimal. Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Ramdhani (2023) meneliti terkait pengurangan resiko bencana tanah longsor dengan program Desa Tangguh Bencana memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis data secara induktif melalui akses data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penulis membahas tentang *network governance* dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat dengan lokus yang digunakan adalah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Pada penelitian sebelumnya yang telah dibahas terdapat persamaan dalam metode penelitian yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif dan persamaan lainnya dapat dilihat dari dinas atau badan pelaksana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai daerah masing-masing. Perbedaan penelitian yang dilakukan yakni pada teori yang digunakan dimana penulis menggunakan teori Provan dan Kenis menggambarkan jaringan tata kelola sebagai struktur relasional yang terdiri dari beberapa organisasi yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, menghubungkan sumber daya, berbagi informasi, dan mengembangkan strategi (Provan dan Kenis, 2008).

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dengan judul *network governance* dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *Network Governance* atau tata jaringan kelola pemerintah (*Network Governance*) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa.
2. Mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam tata kelola jaringan pemerintah (*Network Governance*) pada penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa.
3. Mendeskripsikan upaya dalam menangani permasalahan pada tata kelola jaringan pemerintah dalam penanggulangan bencana longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif studi kasus. Desain penelitian kualitatif yang diambil oleh peneliti sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell (2018) yang mengatakan bahwa “Dalam penelitian

kualitatif, jumlah dan jenis pendekatan juga menjadi lebih jelas terlihat selama tahun 1990-an dan memasuki abad ke-21. Asal mula sejarah penelitian kualitatif berasal dari antropologi, sosiologi, humaniora, dan evaluasi. Buku-buku telah merangkum berbagai jenisnya, dan prosedur lengkap kini tersedia untuk pendekatan penelitian kualitatif tertentu”. Adapun teori yang digunakan peneliti menurut Provan & Kenis (2008), menyatakan bahwa *Network Governance* terbagi atas 3 bentuk, dimana peneliti mengambil bentuk ketiga yaitu *Network Administrative Organization* dimana terdapat 4 (empat) indikator yaitu : *Trust* (Kepercayaan), *Number of Network Participants* (Jumlah Peserta Jaringan), *Network Goal Consensus* (Tujuan Konsensus Jaringan), dan *Need for Network-Level Competencies* (Kebutuhan akan Kompetensi Tingkat Jaringan). Empat indikator ini menjadi penentu berhasilnya *Network Governance* yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten gowa melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gowa.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan judul penelitian yaitu *network governance* dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang dilakukan penulis memberikan hasil yang sesuai dan dirangkum dengan rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut.

#### 3.1. Network Governance Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Pada Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan selama melaksanakan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan yang telah di tulis dalam rumusan masalah pada skripsi ini telah diuraikan sebagai berikut.

##### 3.1.1. Trust (Kepercayaan)

Pada dimensi *trust*, terdapat 2 indikator yakni relasi dan pemantauan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa relasi yang terbentuk berasal dari kepentingan dan tugas yang telah diamanatkan ke masing masing pihak untuk menanggulangi bencana. Para pihak saling mempererat relasi yang terjalin guna menutupi kekurangan satu sama lain dalam penanggulangan bencana longsor. Kemudian dalam penanggulangan bencana tanah longsor khususnya pada fase tanggap darurat dibutuhkan pemantauan berbagai pihak melalui komunikasi yang efektif, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif sehingga *Network Governance* dapat berjalan. Hasil observasi yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa BPBD dan segala pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana tanah longsor lebih sering berkomunikasi dan mendapatkan informasi lewat aplikasi *Facebook*.

### **3.1.2. *Number Of Network Participant (Jumlah Peserta Jaringan)***

Pada dimensi *Number Of Network Participant*, terdapat 3 indikator yaitu koordinasi, partisipasi, dan pengaturan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini BPBD mengelola forum pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak seperti dinas pemerintah lainnya, media, swasta dan masyarakat. Koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Gowa berupa jalinan hubungan baik bersama pihak terkait dan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013. Kemudian Partisipasi para pihak dalam penanggulangan bencana longsor Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan, para pihak yang terlibat mampu menunjukkan partisipasi masing-masing dilihat dari berbagai kasus bencana longsor tahun terakhir. Partisipasi yang aktif dan sesuai aturan dilakukan seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa dengan hasil sesuai tabel laporan realisasi yang dimuat dalam Renstra Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, Pengaturan tata Kelola pemerintah (*Network Governance*) dalam penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa menjadi prioritas dalam pelaksanaannya.

### **3.1.3. *Network Goal Consensus (Tujuan Konsensus Jaringan)***

Pada dimensi *network goal consensus* terdapat indikator yakni tujuan, komitmen, dan keterlibatan. Tujuan dalam jaringan pemerintah untuk penanggulangan bencana longsor tercakup dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Hal ini menentukan bagaimana arah langkah dalam penanggulangan bencana longsor yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Gowa memiliki tujuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013 Bab II Pasal 4. Kemudian komitmen yang dimaksudkan pada jaringan pemerintah dalam menanggulangi bencana longsor seperti penyusunan kebijakan, perencanaan mitigasi, respons darurat, dan upaya pemulihan. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan tata Kelola jaringan pemerintah yang melibatkan berbagai pihak telah melakukan kontribusi yang sesuai dengan tugas dan wewenang.

### **3.1.4. *Need For Network-Level Competencies (Kebutuhan Akan Kompetensi Tingkat Jaringan)***

Pada dimensi *Need For Network-Level Competencies* terdapat indikator sifat tugas. Sifat tugas yang dimaksudkan dalam tata kelola jaringan pemerintah yaitu pada kompleksitas, urgensi, dan dampak dari berbagai isu atau masalah yang dihadapi oleh jaringan tersebut. Kabupaten Gowa dalam hal ini BPBD telah memprioritaskan permasalahan ini dikarenakan bencana longsor di Kabupaten Gowa terjadi tiap tahunnya dan menimbulkan kerugian dan korban jiwa.

## **3.2. *Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penanggulangan Bencana Longsor dengan Network Governancen Pada Masa Tanggap Darurat***



### **3.2.1. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat yang ada dalam tata kelola jaringan pemerintah (*Network Governance*) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa adalah :

1. Personil Yang Kurang Terlatih Dan Tersertifikasi : Beberapa temuan yang didapatkan oleh peneliti menjelaskan bahwa personil dan anggota yang belum terlatih dan tersertifikasi ini didasarkan pada kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa.

2. Kurangnya Informasi : Akses jaringan internet di beberapa daerah dataran tinggi di Kabupaten Gowa sangat terbatas. Informasi terkait peringatan bencana tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Gowa juga sulit diakses di daerah dataran tinggi. Hal ini menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor.

3. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa menyebutkan Dalam Rencana Strategis BPBD yang menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana secara ideal.

### **3.2.2. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yang ada dalam tata kelola jaringan pemerintah (*Network Governance*) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa adalah :

1. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan : Para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa menjalin relasi dengan baik. Adapun forum yang dibentuk dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa melancarkan koordinasi dari pusat sampai pada daerah yang terdampak. Masa tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa di Desa Lanjoboko Kecamatan Parangloe menunjukkan koordinasi yang baik melihat dari kepuasan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat. Dimulai dari para pihak yang terlibat langsung dan juga transparansi penyaluran bantuan bagi korban dan daerah terdampak.

2. Desa Tangguh Bencana : Beberapa daerah yang rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa telah terbentuk menjadi Desa Tangguh bencana. Meskipun belum merata, namun hal ini menjadi faktor pendukung dalam memaksimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa.

3. Tim Reaksi Cepat : Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Gowa menjadi faktor yang paling mendukung dalam pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa. Tim Reaksi Cepat Kabupaten Gowa dalam beberapa kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa menjalin sinergi dan koordinasi lintas sektoral dalam setiap tahapan terutama pada masa tanggap darurat.

### **3.3. Penanganan Permasalahan Pada Tata Kelola Jaringan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Longsor**

Beberapa permasalahan yang ada dalam tata Kelola jaringan pemerintah dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa adalah:

1. Mengoptimalkan Kemudahan Akses Koordinasi Untuk Mengatasi Kurangnya Sarana Dan Prasarana. BPBD Kabupaten Gowa memanfaatkan forum yang terbentuk di beberapa Kecamatan yang rawan terdampak bencana longsor seperti Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong dan lainnya. BPBD beserta Tim Reaksi Cepat Kabupaten Gowa memaksimalkan koordinasi dengan para pihak yang terlibat yakni dengan Masyarakat setempat melalui Camat dan juga Kepala Desa setempat dalam mendapatkan informasi terkini. BPBD dan para pihak yang terlibat memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi baik pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor maupun pada tahap lainnya.

2. Memanfaatkan Tim Reaksi Cepat Untuk Mengatasi Kurangnya Personil Yang Terlatih Dan Tersertifikasi. Tim Reaksi Cepat yang dibentuk menjadi garda terdepan pada tahapan awal penanggulangan bencana dapat menjawab tantangan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana. Tim Reaksi Cepat melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian dalam penanganan darurat bencana. Tindakan yang menjadi Upaya dalam meminimalisir kerugian dari dampak bencana tanah longsor yang terjadi.

3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Pemerintah Kabupaten Gowa memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan Konsep melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan rencana tanggap darurat, dan membangun kapasitas untuk merespons bencana dengan cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pihak Masyarakat dalam tata Kelola jaringan pemerintah dalam memaksimalkan keterlibatan setiap pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa melibatkan berbagai pihak yang mencerminkan model *network governance* dan memungkinkan kerjasama yang lebih baik dalam situasi darurat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting. Masyarakat memiliki peran dalam memberikan informasi awal mengenai kondisi di lapangan, membantu evakuasi, dan memberikan bantuan langsung kepada korban bencana. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan bahwa *network governance* tidak hanya sebatas pada aktor formal, tetapi juga melibatkan komunitas lokal sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan bencana. Meskipun *network governance* memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yaitu personil yang kurang terlatih dan tersertifikasi, kurangnya informasi, dan kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yana Syafieyana Hijri, Muhammad Kamil, Bayu Sadewo, dan Iradhad Taqwa Sihidi yang meneliti tentang bagaimana tata jaringan antar instansi atau pemerintah dapat memaksimalkan program yang menjadi topik dalam penelitiannya yaitu pemenuhan ketersediaan pangan di Kota Malang (Yana Syafieyana Hijri, Muhammad Kamil, Bayu Sadewo, Iradhad Taqwa Sihidi, 2021). Kemudian dalam penelitian Fajar Muhammad Rizky Ginting menemukan bahwa tata kelola jaringan pemerintah yang melibatkan banyak pihak dengan memerhatikan berbagai aspek keterlibatan, komitmen, peran, dan mekanisme dapat memaksimalkan program yang dilakukan dalam penelitiannya yakni penanganan pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru.

Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa memerlukan koordinasi dan komunikasi yang sejalan dan aktif dengan tujuan mencapai sasaran penanggulangan dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan tata Kelola jaringan pemerintah (*Network Governance*) dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa berdasarkan dimensi *Trust* (Kepercayaan) BPBD Kabupaten Gowa beserta para pihak yang terlibat telah memenuhi indikator relasi dengan terjalannya koordinasi yang baik. Namun, dalam indikator pemantauan memerlukan pengawasan lebih lanjut terkait dengan penerapan SOP dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Adapun dalam dimensi *Number of Network Participants* (Jumlah Peserta Jaringan) yaitu pengaturan dan mekanisme penanggulangan bencana longsor pada masa tanggap darurat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa. Dalam dimensi *Network Goal Consensus* (Tujuan Konsensus Jaringan), tujuan bersama jaringan pemerintah tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013. Kemudian, dimensi *Need for Network-Level Competencies* (Kebutuhan akan Kompetensi Tingkat Jaringan). BPBD telah memprioritaskan permasalahan ini dikarenakan bencana longsor di Kabupaten Gowa terjadi tiap tahunnya dan menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Menjadikan kebutuhan akan kompetensi para pihak jaringan sangat tinggi.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini yakni waktu dan data penelitian. Selain itu, lokus bencana pada penelitian ini memiliki akses jalan yang sulit dilalui oleh penulis.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Temuan pada penelitian ini masih berada pada tahap awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan lokus yang sama bahkan lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah

memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. 2022. IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Tahun 2022. Bnpb, 01, 1–338.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat. Pustaka Pelajar.
- Berliani, A. 2023. Efektivitas Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ginting, Fajar M. R. (2021). Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.
- Hijri, Yana S. (2021). “Network Governance Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Di Kota Malang.” *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram* (2021)
- Helut, A. H. 2023. Kinerja Aparatur Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ramadhani, Z. 2023. Pengurangan Risiko Bencana Longsor Melalui Program Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Trisnawanti, S. I. 2022. Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mulyaningsih, S., & Setiadi, T. 2014. Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Tanah Longsor di Kabupaten Gunung Kidul Berbasis Web. *Jurnal Sarjana Teknik Informatika* Volume 2 Nomor 1.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (2000). Public Management and Policy Networks: Foundations of a network approach to governance. *Public Management: An International Journal of Research and Theory*, 2(2), 135–158.
- Keith G. Provan, Patrick Kenis, Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 2, April 2008, Pages 229–252.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Gowa
- <https://bpbd.sulselprov.go.id/krb-nasional-pro-sulsel-2022-2026/>